

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi menurut Meier (1985) adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus chance*) dalam perubahan struktur ekonomi seperti dari pertanian ke industri atau jasa. Kemudian adanya perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Sedangkan kurun waktu yang panjang diartikan bahwa kenaikan pendapatan per kapita perlu berlangsung terus menerus dan berkelanjutan (Kuncoro, 2000).

Badrudin (2012) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan. Kemudian muncul alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan

pendapatan per kapita. Definisi ini lebih menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan *output* yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dan sering dikaitkan dengan mengubah sebuah struktur suatu negara seperti dari pertanian yang digantikan menjadi industri (Caska, 2008).

Dengan adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang pemerintahan daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundangan, maka pembangunan ekonomi tidak hanya dilaksanakan di lingkup nasional tapi juga pada daerah atau regional. Arsyad (2010) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi regional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah pun dapat meningkat.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah, dan antarsektor (Caska, 2008). Untuk mengetahui keberhasilan tersebut dapat dilihat menggunakan data pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) daerah tersebut yang dianalisis sesuai dengan analisis pertumbuhan, yaitu besarnya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi yang dapat dilihat dengan tipologi klassen, ketimpangan dengan analisis indeks ketimpangan.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif tentang perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional maupun regional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumber-sumber daya dalam suatu negara akan bertambah dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat produksi nasional maupun regional yang dihasilkan bertambah besar. Adanya investasi akan menambah barang-barang modal di masa depan dan akan menambah potensi dalam menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Simon Kuznets dalam Todaro (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologis yang diperlukannya. Kuznet memberikan tiga

komponen penting dalam definisi ini yang dibahas lebih rinci sebagai berikut Arsyad (2010):

- a. Kenaikan *output* Nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kemampuan suatu perekonomian negara tersebut dalam menyediakan berbagai macam barang ekonomi, serta sebagai tanda kematangan ekonomi.
- b. Kemajuan teknologi sebagai syarat yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi, namun bukan merupakan syarat yang cukup (*sufficient condition*) dalam merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru.
- c. Penyesuaian kelembagaan, ideologi harus segera dilakukan. Adanya inovasi teknologi harus disertai inovasi sosial. Jika potensi ada namun tanpa *input* yang melengkapi, tidak akan berarti apa-apa.

BPS Kabupaten Blora (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan dengan menghitung laju pertumbuhan ekonomi baik regional maupun sektoral. Menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) biasanya dilakukan dengan cara PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu (t) yang dikurangi PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya (t-1). Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya (t-1) yang hasil akhirnya dikalikan 100.

Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui pola dan struktur daerah tersebut dengan menggunakan tipologi klassen yang akan diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: daerah maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), serta daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

### **3. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai berikut (Arsyad, 2010):

#### **a. Teori Ekonomi Neo Klasik**

Teori ekonomi Neo Klasik memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal dapat mengalir tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah berupah rendah.

b. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari daerah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Teori Lokasi

Lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan akan meminimumkan biaya dengan memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Namun saat ini adanya teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu dalam kegiatan produksi dan distribusi barang.

d. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) berasumsi bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Teori ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di

perkotaan maupun di perdesaaan. Seperti perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang berbatasan. Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya sebagai wilayah pemukiman.

e. Teori Kausasi Kumulatif

Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab dari perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara yang semakin bertambah buruk. Ada dua sisi dalam konsep kausasi kumulatif ini yang disebabkan oleh pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju sehingga menyebabkan situasi dimana hambatan menjadi lebih besar bagi daerah yang terbelakang untuk dapat maju dan berkembang.

f. Model Daya Tarik (*Attraction*)

Teori daya tarik industri merupakan model pembangunan ekonomi yang paling sering digunakan masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap para industrialis dengan jalan pemberian subsidi dan insentif.

#### 4. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Myrdal dalam Kuncoro (2004), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spreads effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antardaerah.

Arsyad (2010) menjelaskan lebih rinci tentang faktor yang menyebabkan munculnya *backwash effects*, yaitu:

- a. Pola perpindahan penduduk (migrasi) ke daerah yang lebih maju. Pada umumnya, kaum migran adalah golongan penduduk yang berusia relatif muda, mempunyai semangat dan etos kerja tinggi, serta tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk yang memilih tetap tinggal di daerah miskin (relatif tertinggal). Adanya perpindahan penduduk akan mengakibatkan kelangkaan tenaga kerja produktif yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi di daerah yang miskin (relatif tertinggal) tersebut.
- b. Pola aliran modal yang terjadi. Terdapat tiga hal yang menyebabkan daerah miskin (relatif tertinggal) kesulitan dalam mengembangkan pasar atas hasil industrinya yang berakibat lambatnya perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Ketiga hal tersebut

adalah kurangnya ketersediaan modal di daerah miskin, adanya kecenderungan bahwa modal lebih terjamin dan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah yang lebih maju, dan polaperdagangan yang didominasi oleh industri di daerah yang lebih maju.

- c. Jaringan transportasi yang lebih baik di daerah yang lebih maju. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan produksi dan perdagangan lebih efisien jika dilaksanakan di daerah yang lebih maju.

Sedangkan untuk *spread effects* atau pengaruh yang menguntungkan menurut Myrdal (1957) seringkali berupa penambahan permintaan atas produk dari daerah miskin (relatif tertinggal) yang biasanya berwujud bahan baku industri yang diperlukan oleh daerah yang lebih maju. Produk dari daerah miskin (relatif tertinggal) merupakan hasil-hasil dari kegiatan ekonomi utama, seperti hasil pertanian, dan hasil industri rumah tangga. Meskipun terdapat pengaruh yang menguntungkan sehingga dapat mendorong pembangunan dari daerah miskin (relatif tertinggal), perlu diketahui bahwa besarnya *spread effects* biasanya lebih kecil daripada *backwash effects*. Hal tersebut membuat pembangunan di daerah lebih maju selalu lebih baik sehingga daerah miskin (relatif tertinggal) akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sehingga ketimpangan semakin melebar dan terdapat jurang kesejahteraan antar daerah (Arsyad, 2010).

Berdasarkan *trend* dalam ketimpangan pendapatan, Kuncoro (2000) membagi menjadi empat ketimpangan, yaitu:

- a. Ketimpangan Kota dan Desa, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan di kota dan di desa.
- b. Ketimpangan Regional, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan wilayah atau daerah.
- c. Ketimpangan Interpersonal, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antar individu (personal).
- d. Ketimpangan antar Kelompok Sosial Ekonomi, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan yang dilihat dari tingkat sosial ekonomi baik dari segi profesi pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Antika (2015) mendefinisikan bahwa ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada kurun waktu tertentu. Dengan perbedaan laju pertumbuhan penduduk, sumber daya manusia, sumber daya alam, pengangguran serta tidak meratanya penanaman modal menyebabkan pembangunan antar daerah berbeda dan pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan penduduk di daerahpun tidak sama.

Ketimpangan pendapatan terjadi karena beberapa faktor. Emilia dan Imelia (2006) menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi adalah:

a. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah yang tingkat konsentrasi ekonomi rendah, cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sumber daya alam, keterbatasan seperti infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

b. Alokasi Investasi

Perbedaan alokasi investasi membuat pertumbuhan antar daerah berbeda. Investor cenderung akan menanamkan modal pada daerah yang lebih maju. Sebaliknya rendahnya investasi di daerah yang kurang maju membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di daerah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

c. Perbedaan Sumber Daya Alam antar Daerah

Pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam (SDA) akan lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Dalam arti SDA dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan selain itu diperlukan faktor-faktor lain yang sangat penting yaitu teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Semakin pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan SDM, faktor *endowment* lambat laun akan tidak relevan. Sebagai contoh Singapura, Korea Selatan, dan Jepang yang merupakan negara yang miskin SDA namun dapat menjadi negara maju.

d. Perbedaan Kondisi Demografis antar Daerah.

Ketimpangan Ekonomi Regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Daerah dengan kondisi demografis yang baik tingkat produktivitas kerjanya

lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya.

e. Kurang Lancarnya Perdagangan antar Daerah.

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (*intra-regional trade*) merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional. Tidak lancarnya *Intra-trade* disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai contoh karena keterbatasan transportasi menjadi kesulitan bagi daerah untuk mendapatkan bahan baku untuk proses produksi sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi suatu daerah tidak beroperasi optimal. Sjafrizal (2008) menjelaskan tentang kebijakan yang dapat diupayakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menanggulangi ketimpangan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan regional antar daerah.

f. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan.

Upaya mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruhan pelosok wilayah. Prasarana dan sarana perhubungan seperti fasilitas jalan, terminal, dan pelabuhan laut guna mendorong perdagangan antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut jaringan dan fasilitas

telekomunikasi juga sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terisolir dan tidak dapat berkomunikasi dengan daerah lainnya. Disamping itu pemerintah juga perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar daerah dan telekomunikasi. Bila hal tersebut dilakukan maka ketimpangan dapat berkurang karena mobilitas perdagangan diperlancar dan daerah yang kurang maju dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi di daerahnya. Sehingga kegiatan produksi dan penyediaan lapangan kerja dapat ditingkatkan.

g. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Perpindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah (transmigrasi) dan perpindahan penduduk yang dilakukan dengan sukarela dengan biaya sendiri (migrasi spontan) merupakan upaya yang dapat membantu daerah yang relatif tertinggal untuk pemenuhan tenaga kerja sehingga proses pembangunan dapat digerakkan.

h. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara tersebar. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan dengan mendorong pusat pertumbuhan di kota-kota skala kecil menengah yang akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih disebar ke pelosok daerah.

i. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menggali potensi daerah yang ada. Dengan hal ini pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan daerah dapat dikurangi.

## 5. Pendapatan Regional

Pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada daerah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan daerah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah tersebut. Menganalisis suatu daerah (*region*) atau membicarakan tentang pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan daerah. Salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat.

Parameter lain, seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan daerah haruslah berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan per kapita (Tarigan, 2015).

Beberapa konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional adalah sebagai berikut (Tarigan, 2015):

a. Pendapatan Regional

Pendapatan regional neto adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan yang timbul, atau merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan di daerah tersebut. Akan tetapi, pendapatan yang dihasilkan tersebut, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah setempat. Hal itu disebabkan ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut. Dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar, yaitu milik orang yang mempunyai modal. Sebaliknya, jika penduduk daerah menanamkan modal di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah pendapatan yang mengalir masuk hasilnya merupakan produk regional neto, yaitu merupakan jumlah pendapatan yang

benar-benar diterima (*incomereceipt*) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

b. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per Kapita adalah total dari pendapatan suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah tersebut. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan sesuai kebutuhan.

c. Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Seperti telah diuraikan di atas, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan tersebut dibedakan dua faktor, yaitu kenaikan atau penurunan riil, yaitu tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat. Kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga.

d. Pendapatan

Pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga. Oleh karena itu, untuk mengetahui pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus

dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan.

Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual.

e. Perubahan Tahun Dasar 2000 Menjadi 2010

Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) menjelaskan bahwa tahun dasar merupakan perangkat penting secara spesifik digunakan untuk perhitungan PDRB. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak lima kali yaitu tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar dikarenakan beberapa alasan, yaitu telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru, rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 tahun atau 10 tahun, dan tersedianya data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) untuk perbaikan PDB/PDRB. Dengan perubahan tersebut mulai tahun 2014 PDRB terbagi dalam 17 kategori. Klasifikasi tersebut didasarkan pada klasifikasi rekomendasi *System of National Account* (SNA) 2008 yang membandingkan data PDB baik secara total maupun sektoral, serta klasifikasi baru yang lebih rinci agar dapat mempermudah penggunaan data.

## **6. Hipotesis Kuznets tentang Kurva U-terbalik**

Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznets. Kuznet mengungkapkan bahwa pada tahap awal pembangunan ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang disertai tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi pula. Distribusi pendapatan akan membaik seiring bertambahnya pendapatan per kapita yang akhirnya membentuk kurva berbentuk U-terbalik (Badrudin, 2015). Seolah-olah dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Namun dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan akan berubah menjadi negatif. Maksud dari korelasi yang negatif antara keduanya adalah peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2004). Arsyad (2010) menjabarkan terdapat banyak ulasan yang mencoba untuk menjelaskan mengapa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan cenderung memburuk, lalu kemudian pada tahap berikutnya mulai membaik. Sebagian besar dari ulasan tersebut mengkaitkannya dengan kondisi struktural perekonomian tersebut. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya terpusat di sektor modern.

Pada tahap ini, lapangan kerjanya terbatas, namun tingkat upah dan produktivitasnya terhitung tinggi. Ada kesenjangan pendapatan antara sektor modern dan sektor tradisional yang pada awalnya akan semakin melebar dalam waktu yang singkat, namun pada akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan di sektor modern relatif lebih tinggi daripada yang terjadi yang terjadi di sektor tradisional (sektor tradisional relatif stagnan). Selain itu, pada tahap ini langkah-langkah transfer pendapatan dan berbagai kebijakan lainnya yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan akan menemui jalan buntu, karena terbatasnya dana pemerintah sehubungan dengan masih relatif rendahnya pendapatan nasional yang dimiliki.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Caska (2008) dalam penelitiannya tentang “*Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Provinsi Riau Tahun 2003-2005*”. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, korelasi Pearson dan kurva U terbalik oleh Kuznets. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tipologi klassen hanya 1 kota yang termasuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh, 4 kabupaten di kategori daerah berkembang cepat, 3 kabupaten di kategori daerah maju tapi tertekan, sedangkan 3 kabupaten lainnya dikategorikan masih relatif tertinggal. Selama periode pengamatan 2003-2005 hasil Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Riau rendah yang berarti masih terjadi pemerataan pembangunan selama periode pengamatan. Hasil korelasi pearson untuk membuktikan hubungan antara PDRB dan indeks ketimpangan baik Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil tidak signifikan pada  $\alpha$  5% dan kurva U terbalik Kuznets tidak terbukti di Provinsi Riau selama periode pengamatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Masli (2008) tentang “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 1993-2006*”. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan

ekonomi, tipologi Klassen, indeks Williamson, dan indeks Entropi Theil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode penelitian antara periode tahun 1993-2006 mengalami fluktuasi dan menunjukkan arah yang negatif. Apabila dibandingkan pada awal penelitian. Menurut tipologi Klassen, kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 1993-2006 termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal. Ketimpangan antar kabupaten/kota cenderung meningkat dikarenakan adanya perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Berbeda dengan Raswita dan Utama (2013) mereka melakukan penelitian tentang “*Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar*”. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi kelas, Indeks Williamson, dan pembuktian hipotesis Kuznets dengan regresi non linier model kuadrat. Dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di Kabupaten Gianyar memakai alat analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan daerah menunjukkan Kecamatan di Kabupaten.

Selain di Provinsi Riau, Jawa Barat, dan Gianyar, Mahardiki dan Santoso (2013) meneliti antar Provinsi di Indonesia menggunakan alat analisis Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Paired Sample T-Test, dan Tipologi Klassen.

Dalam penelitiannya ”*Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Indonesia 2006-2011*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari perhitungan Indeks Williamson selama periode penelitian tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan pergerakan meningkat dengan nilai pada tahun 2011 sebesar 0,83. Berdasarkan uji paired sample t-test bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan pada tahun 2011 dibandingkan dengan 2006. Sedangkan hasil dari indeks Entropi Theil didapatkan ketimpangan di Indonesia selama periode penelitian cenderung menurun dengan nilai sebesar 0,34 pada tahun 2011 meskipun meningkat pada 32 akhir periode. Hasil dari tipologi klassen menunjukkan bahwa kecenderungan provinsi di Indonesia berada pada kategori daerah maju tapi tertekan.

Di provinsi Kalimantan Barat, Kurniasih (2013) dalam penelitiannya tentang ”*Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznets*”. Periode penelitian adalah selama tahun 2001-2010. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, tipologi klassen dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2001-2010 tergolong rendah dengan angka Indeks Williamson sebesar 0,332.

Hipotesis Kuznets tidak terbukti di Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian karena ketimpangan di Kalimantan Barat selama periode penelitian cenderung menurun pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat. Berdasarkan hasil regresi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Bukan hanya menggunakan alat analisis tipologi klassen dan indeks Williamsons, Indah (2013) menambahkan regresi non linear pada alat penelitiannya. Dalam penelitiannya tentang "*Ketimpangan Pembangunan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*" periode penelitian dari tahun 2003-2011 menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Bali terbagi dalam 4 kategori menurut tipologi klassen dan paling banyak berada dikategori daerah relatif tertinggal. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tergolong tinggi dengan angka Indeks Williamson sebesar 0,68. Kurva U terbalik Kuznets tidak berlaku di Provinsi Bali selama periode penelitian. Gianyar terbagi menjadi empat klasifikasi yang ada. Pada Periode 1993-2009 Sebanyak empat Kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tegallang berada pada kuadran IV. Kecamatan Payangan berada pada kuadran III dan Kecamatan Tampaksiring berada pada Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan. Kecamatan Ubud berada pada Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gianyar periode 1993-2000 antar kecamatan pada periode tersebut mengalami peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di kabupaten Gianyar periode penelitian adalah sebesar 0,300. Kurva hubungan antara Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita menunjukkan bentuk U terbalik, dapat dikatakan hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Gianyar pada periode penelitian (1993 -2009).

Di dalam jurnal Internasional Żukowski (2015), yaitu tentang “*The Impact of Inequalities in Regional Economic Development on Disparities in Spatial Distribution of Cashless Payment Infrastructure in Poland*”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi Linear dan Korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan merupakan penentu signifikan secara statistik dari kesenjangan spasial dalam distribusi infrastruktur pembayaran cashless di Polandia. Pola umum distribusi PDB per orang (GDPPP) dan indeks komposit pembangunan cashless infrastruktur pembayaran (CPIDI) di seluruh wilayah negara cukup mirip. Tingkat tertinggi pembangunan infrastruktur untuk pembayaran cashless ditemukan di *voivodeships* terkaya Mazowieckie dan daerah Western Poland, sedangkan *voivodeships* relatif kurang berkembang secara ekonomi dari Timur Polandia tampaknya jelas tertinggal. Selanjutnya, *classification* dari *voivodeships* menurut kuintil distribusi GDPPP dan CPIDI mengungkapkan bahwa dari semua enam belas *voivodeships*, enam ditugaskan untuk kelas yang sama baik menurut kriteria dan delapan ditugaskan untuk kelas tetangga.

Analisis yang dilakukan korelasi dan regresi disediakan beberapa argumen sional ini mendukung hasil di atas. Nilai-nilai yang relatif tinggi dan signifikan secara statistik dari kedua Pearson koefisien linear korelasi (0,787) dan koefisien korelasi rank Spearman (0,797) menunjukkan tioratnya positif yang kuat antara GDPPP dan CPIDI.

Dalam penelitian tentang “*Regional Income Inequality in A Development Nation: A Cross-sectional Study Of Australia Substate Regions*”. Menggunakan Alat Analisis Hipotesis Kuznets. McGillivray dan Peter (2010) menunjukkan bahwa hipotesis ini memprediksi bahwa daerah di negara-negara yang sangat maju akan mengalami tingkat yang lebih tinggi dari ketidaksetaraan pengembangan berlangsung. Pola ini dapat diartikan bahwa tingkat regional ketimpangan pendapatan akan berkurang dan stabil jika tingkat pertumbuhan regional menyamakan kedudukan dan relatif pendapatan rata-rata regional tetap konstan. Oleh karena itu, kesan dapat mengingat bahwa trade-off ada antara tingkat yang lebih tinggi dari pembangunan dan tingkat yang lebih tinggi dari ketidaksetaraan. Hasil kami menunjukkan bahwa seperti *trade-off* mungkin tidak ada, sehingga kebijakan pemerintah bermaksud baik yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam distribusi regional pendapatan melalui upaya untuk sama tingkat pertumbuhan ekonomi ide daerah dapat menjalankan risiko menghambat pertumbuhan keseluruhan laju pembangunan tanpa mempengaruhi tingkat kualitas pendapatan daerah.

Selanjutnya pada tahun 2014 penelitian yang dilakukan oleh Wahiba dengan judul “*Regional Development and Inequality of Income Distribution*” . Penelitian ini menggunakan alat analisis Kurva Lorenz. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Ketimpangan kertas upah oleh gubernuran, itu untuk mempelajari kesenjangan antar daerah dalam distribusi upah. Studi ekonometrik menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur, pembangunan daerah dan investasi asing langsung dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Ini mengikuti bahwa keterbukaan dengan pengenalan investasi asing di beberapa daerah negara itu dapat menawarkan banyak kesempatan kerja; sama, hibah yang tersedia untuk investasi di daerah tertinggal atau pembangunan daerah dapat mendorong investasi yang menjanjikan dengan modal minimum yang mempromosikan kerja dan dengan demikian penyempitan kesenjangan antar daerah.

Namun demikian, sejumlah tantangan tetap untuk Tunisia sehubungan dengan proses yang terlibat integrasi ke dalam ekonomi dunia mengenai disparitas regional yang bertahan dan yang menyebabkan revolusi Tunisia tahun 2011 terutama dengan keterlambatan bidang barat tengah dan selatan mendaftar lagi pada beberapa indikator sosial-ekonomi seperti akses ke infrastruktur dasar tertentu, tingkat pengangguran tertinggi IPM yang semakin tinggi dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah.

**c. Hipotesis**

1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah Ekonomi Berdasarkan Indeks Ketimpangan

a. Indeks Williamson

$\geq 1$  = sangat tinggi

0,71-1 = tinggi

0,4-0,69 = menengah

$\leq 0,39$  = rendah

b. Indeks Entrophy Theil

Jika = 0 maka pemerataan sempurna

Jika  $\geq 0$  maka terjadi ketimpangan

Telah terbukti dari skala tersebut sesuai penelitian (Masli, 2008) dengan rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,7 dan Indeks Entrophy Theil sebesar 1,3 dikategorikan tinggi karena laju pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap ketimpangan. Dan penelitian (Indah, 2013) dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,8428 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi.

c. Hubungan antara Laju Pertumbuhan dan Indeks Ketimpangan pada Hipotesis Kuznet tentang Kurva U Terbalik

Dalam hal pembuktian kurva U terbalik digunakan sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

- a. Menghubungkan antara angka Indeks Williamson dengan laju pertumbuhan PDRB
- b. Menghubungkan antara angka Indeks Entophy Theil dengan laju pertumbuhan PDRB

Dengan indikator apabila kedua kurva angka indeks tersebut menggambarkan kurva u terbalik, maka teori Kuznets berlaku. Telah terbukti dari penelitian (Indah, 2013) kurva hubungan antara indeks ketimpangan dengan laju pertumbuhan ekonomi menyerupai huruf U terbalik. Ini membuktikan pada awal terjadinya pertumbuhan ekonomi disertai dengan ketimpangan yang memburuk pada masa berikutnya ketimpangan akan semakin menurun.

Maka hipotesisnya adalah:

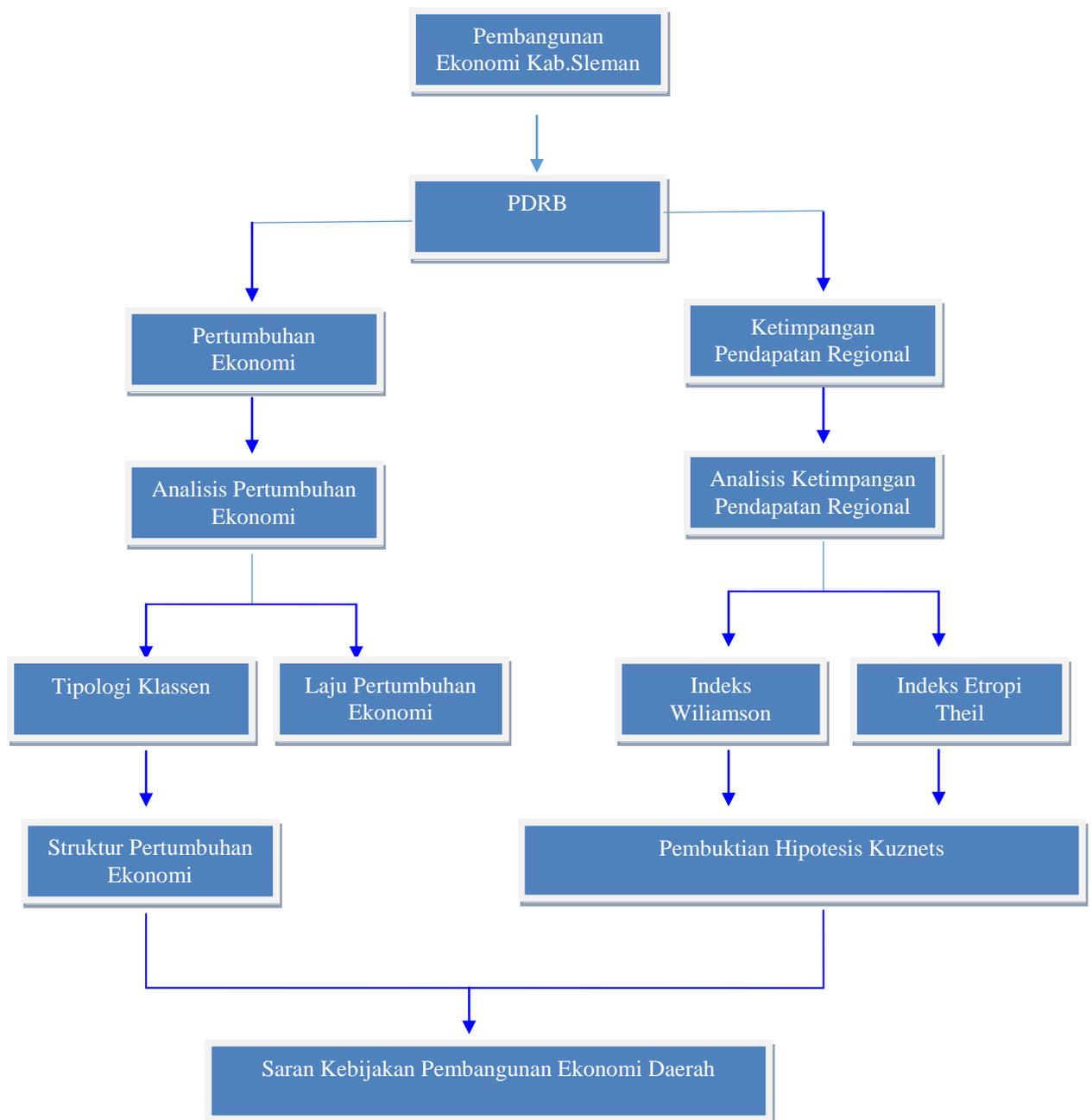
- Diduga ketimpangan pembangunan wilayah ekonomi di kabupaten Sleman tergolong tinggi berdasarkan indeks ketimpangan.
- Diduga ada hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan indeks ketimpangan sehingga hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik berlaku di Kabupaten Sleman.

Variabel	Hubungan	Referensi
Tingkat Ketimpangan	Tinggi	(Masli, 2008), (Indah, 2013), (Yuliani, 2015), (Mopangga, 2011), (Maranatha, 2017), (Bimbim, 2013), dan (Angelia, 2010).
Hipotesis Kuznet	Berlaku	(Mahesa, 2013), (Yuliani, 2015), (Sutarno dan Mudrajat, 2003), (Nurhuda, 2013), dan (Angelia, 2010), dan (Kurniawati, 2009).

#### d. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi juga dituntut untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dari tujuan tersebut, maka keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang dianalisis dengan analisis pertumbuhan dan analisis ketimpangan. Untuk analisis pertumbuhan akan dihitung menggunakan alat analisis tipologi klassen dan dihitung besar laju pertumbuhannya. Sedangkan dari analisis ketimpangan data akan dihitung menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sleman.

Kemudian pembuktian hipotesis Kuznets dengan membuat kurva antara laju pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan. Dari hasil penelitian dapat dirumuskan strategi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan regional antar kecamatan di Kabupaten Sleman. Berikut bagan kerangka pemikiran:



**Gambar 2.1**

Kerangka Pemikiran

